

BAB II

TINJAUAN LITERATUR PENGARUH PELABUHAN TERHADAP SOSIAL EKONOMI

Pada bab ini akan dijelaskan teori-teori yang relevan dan berkaitan dengan studi yang dilakukan. Teori-teori tersebut digunakan sebagai dasar melakukan penelitian. Kajian literatur meliputi pelabuhan dalam pembangunan wilayah, pengaruh pelabuhan terhadap aspek sosial, pengaruh pelabuhan terhadap aspek ekonomi, serta sintesa penelitian.

2.1 Pelabuhan sebagai Prasarana Wilayah

Istilah pelabuhan telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Menurut PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang kepelabuhanan, pelabuhan merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan/ atau perairan dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusaha yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Pelabuhan sebagai prasarana transportasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai mata rantai kegiatan perekonomian, pelabuhan menghubungkan suatu perusahaan dengan pasar yaitu memudahkan proses pendistribusian produk untuk dapat dipasarkan secara global.

Dalam segi kepentingan suatu daerah pelabuhan memiliki arti ekonomis yaitu pelabuhan mempunyai fungsi sebagai tempat ekspor impor dan kegiatan ekonomi lainnya yang saling berhubungan sebab akibat (Bintarto, 1968 dalam Franata, 2015). Suatu pelabuhan yang dikelola dengan efisien serta dilengkapi dengan fasilitas yang memadai akan berdampak positif bagi perdagangan dan perindustrian dari tempat pelabuhan tersebut. Kemudian, adanya perdagangan dan perindustrian yang berkembang dengan pesat, mengakibatkan perkembangan pelabuhan yang meningkat.

Dalam PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang kepelabuhanan, pelabuhan memiliki fungsi sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan perusahaan. Kegiatan dalam fungsi pemerintahan di pelabuhan adalah pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran. Selain itu pada pelabuhan dapat dilakukan fungsi kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaaan. Untuk fungsi perusahaan, kegiatan di pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang, serta jasa terkait dengan kepelabuhanan.

Menurut PP No 61 Tahun 2009 tentang kepelabuhanan, pelabuhan laut memiliki hierarki, yaitu:

a. Pelabuhan Utama

Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar. Dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/ atau barang, serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan antar provinsi. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, lokasi pelabuhan utama berpedoman pada kriteria teknis sebagai berikut:

- Kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar internasional
- Berada dekat dengan jalur pelayaran internasional kurang dari 500 mil dan jalur pelayaran nasional kurang dari 50 mil
- Memiliki jarak dengan pelabuhan utama lainnya minimal 200 mil
- Kedalaman kolam pelabuhan minimal -9 m LWS
- Memiliki dermaga dengan kapasitas minimal 10.000 DWT
- Panjang dermaga minimal 350 m'
- Luas lahan pelabuhan minimal 50 Ha
- Berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional
- Diproyeksikan melayani angkutan petikemas minimal 100.000 TEUs/ tahun atau angkutan lain yang setara
- Memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang

b. Pelabuhan Pengumpul

Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/ atau barang, serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, lokasi pelabuhan pengumpul berpedoman pada kriteria teknis sebagai berikut:

- Berada dekat dengan jalur pelayaran nasional kurang dari 50 mil
- Memiliki jarak dekat dengan pelabuhan pengumpul lainnya minimal 50 mil
- Kedalaman kolam pelabuhan mulai dari -7 sampai dengan -9 m LWS
- Memiliki dermaga dengan kapasitas minimal 3.000 DWT
- Panjang dermaga 120 – 350 m'
- Luas lahan pelabuhan sesuai kebutuhan
- Memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang

c. Pelabuhan Pengumpan

Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/ atau barang, serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan provinsi. Pelabuhan pengumpan terbagi menjadi dua, yaitu pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.

1) Pelabuhan pengumpan regional merupakan pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyebrangan antar kabupaten/kota dalam 1 provinsi. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, lokasi pelabuhan pengumpan regional berpedoman pada kriteria teknis sebagai berikut:

- Memiliki jarak dengan pelabuhan regional lainnya minimal 20-50 mil
- Kedalaman kolam pelabuhan mulai dari 5 sampai dengan -7 m LWS
- Kapasitas dermaga maksimal 3.000 DWT

- Panjang dermaga 80 – 120 m'
 - Luas lahan maksimal 5 Ha
 - Memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang
- 2) Pelabuhan pengumpan lokal merupakan pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyebrangan dalam 1 kabupaten/kota. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, lokasi pelabuhan pengumpan lokal berpedoman pada kriteria teknis sebagai berikut:
- Memiliki jarak dengan pelabuhan lokal lainnya minimal 5-20 mil pada garis pantai yang sama
 - Kedalaman kolam pelabuhan maksimal -5m LWS
 - Kapasitas dermaga maksimal 1.000 DWT
 - Panjang dermaga maksimal 80m'
 - Luas lahan maksimal 1 Ha
 - Memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang

2.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

Adanya perkembangan perusahaan yang memiliki peran yang penting dalam pembangunan akan membawa kondisi sosial masyarakat disekitar perusahaan berkembang menjadi lebih baik (Andryanda, 2016). Di Indonesia, CSR (*Corporate Social Responsibility*) menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”). Menurut Pasal 1 ayat 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. CSR sendiri merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berada, seperti

melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan.

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) menyatakan bahwa CSR sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, komunitas lokal dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Konsep CSR sebagai kewajiban untuk peduli terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lokal atau sekitarnya dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti pemberdayaan ekonomi rakyat berupa pembinaan usaha baik kecil atau menengah, penyediaan atau pelayanan kesehatan, pendidikan masyarakat, penyediaan sarana prasarana umum, dan sebagainya. Oleh karena itu, CSR pada dasarnya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat setempat melalui kontribusi perusahaan tersebut. Di lain sisi, CSR memiliki dampak terhadap perusahaan itu sendiri, yaitu menciptakan brand image yang akan menciptakan *customer loyalty* di tengah pasar yang kompetitif. Kemudian, CSR juga akan memudahkan suatu perusahaan dalam mendapatkan atau melanjutkan *license to operate* dari pemerintah maupun publik karena dinilai telah memenuhi standar tertentu dan memiliki kepedulian sosial (Ditjen PP Kemenkum HAM).

Menurut Bhatt (2002), CSR dapat dilihat sebagai suatu rangkaian dalam tiga tahapan, yaitu:

1. Kepatuhan

Perusahaan setidaknya harus mematuhi kebijakan nasional dan perusahaan multinasional, khususnya mengenai kegiatan dan praktik lokal.

2. Minimalisasi resiko

Perusahaan harus menyadari dampak sosial ekonomi, politik, dan lingkungan yang mungkin ditimbulkan termasuk potensinya. Perusahaan harus membangun kesadaran, mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur untuk meminimalisir bahaya yang mungkin dihasilkan dari kebijakan ataupun mitra bisnis mereka.

3. Penciptaan nilai

Perusahaan harus menciptakan nilai sosial yang inovatif, konsultasi stakeholders, dialog kebijakan, dan membangun institusi sipil baik itu sendiri ataupun dengan perusahaan lain.

2.3 Pengaruh Pelabuhan terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat

Konsep sosial ekonomi seringkali diartikan secara terpisah antara sosial dan ekonomi, namun kedua hal tersebut sangatlah terikat satu sama lain. Menurut Koentjaraningrat (1981) dalam Sholihah (2018), kondisi sosial ekonomi adalah suatu keadaan yang diatur secara sosial dan menetapkan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat. Sosial ekonomi berhubungan dengan keadaan dan kondisi dimana manusia itu hidup dan harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Penduduk dan kepadatan penduduk, konsumsi dan produksi pangan, perumahan, sandang, kesehatan dan penyakit, sumber-sumber kekuatan dan pada tingkat dasarnya faktor-faktor ini berkembang tidak menentu dan sangat drastis mempengaruhi kondisi dimana manusia itu harus hidup (Koentjaraningrat, 1981 dalam Sholihah, 2018). Aspek sosial ekonomi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti pendapatan, perumahan, pendidikan, kesehatan, serta sandang dan pangan. Oleh karena itu, aspek sosial ekonomi sangat berpengaruh dan berkaitan terhadap kondisi kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Purmadiansyah (2018) kesejahteraan sosial dalam artian luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental, dan segi kehidupan spiritual (Adi, 2003 dalam Purmadiansyah, 2018). Istilah sosial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Istilah sosial ditujukan untuk mengatasi persoalan di masyarakat dalam konteks kesejahteraan. Pembangunan suatu wilayah ditujukan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan dipandang sebagai proses multidemensi yang melibatkan berbagai perubahan dasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional, seperti percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan dan

penanggulangan kemiskinan. Pembangunan dalam masyarakat setidaknya harus memiliki 3 tujuan (Todaro dan Smith, 2011):

1. Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang – barang kebutuhan hidup yang pokok.
2. Peningkatan standar hidup yang bukan hanya tercermin dari peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian yang lebih besar terhadap nilai – nilai budaya dan kemanusiaan.
3. Perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan yang tidak hanya membebaskan dari sikap menghamba dan perasaan bergantung kepada orang dan negara lain tetapi juga dari berbagai faktor yang menyebabkan kebodohan dan kesengsaraan.

2.3.1 Kesejahteraan Sosial

Pembangunan suatu wilayah ditujukan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Pembangunan meliputi tiga kegiatan yang saling berhubungan, yaitu pertama, menimbulkan peningkatan kemakmuran dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan sebagai tujuan dengan tekanan perhatian pada lapisan terbesar (dengan pendapatan terkecil) dalam masyarakat. Kedua, memilih metode yang sesuai untuk mencapai tujuan itu dan ketiga yaitu, menyusun kembali (*restructuring*) masyarakat dengan maksud agar terjadinya pertumbuhan sosial ekonomi yang kuat (Jayadinata, 1999).

Menurut UU No 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan dapat diukur berdasarkan indikator- indikator yang ada. Adapun indikator- indikator tersebut menurut Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2005, yaitu:

1. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diterima dan dihitung dalam jangka waktu tertentu. Tingkat pendapat yang tinggi dapat memberikan peluang dalam meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidup. Menurut

BPS (2008) menggolongkan pendapatan penduduk ke dalam 4 golongan, yaitu:

- a. Golongan berpendapatan rendah, rata – rata pendapatannya kurang dari Rp1.500.000,00 /bulan setiap kepala rumah tangga
- b. Golongan berpendapatan sedang, rata – rata pendapatan antara Rp1.500.000,00 – Rp2.500.000,00 /bulan setiap kepala rumah tangga
- c. Golongan berpendapatan tinggi, rata – rata pendapatan Rp2.500.000,00 – Rp3.500.000,00 /bulan setiap kepala rumah tangga
- d. Golongan berpendapatan sangat tinggi, rata – rata pendapatan lebih dari Rp3.500.000,00 /bulan setiap kepala keluarga

2. Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga

Dengan menggunakan data pengeluaran rumah tangga maka dapat diketahui pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan tolak ukur guna menilai tingkat kesejahteraan ekonomu penduduk. Makin rendah presentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka makin membaik pula tingkat kesejahteraan penduduknya.

3. Keadaan tempat tinggal

Kriteria tempat tinggal yang dinilai adalah jenis atap rumah, dinding rumah, status kepemilikan rumah, lantai rumah, dan luas lantai rumah.

4. Fasilitas tempat tinggal

Adapun fasilitas tempat tinggal yang dinilai, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, WC serta jarak WC dari rumah.

5. Kesehatan anggota keluarga

Kesehatan merupakan elemen terpenting dalam kehidupan umat manusia. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, adapun pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

6. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan
Kemudahan pelayanan kesehatan, yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak took obat, penanganan obat-obatan, dan alat kontrasepsi.
7. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan
Kriteria kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan.
8. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi
Kriteria dalam kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi adalah ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan.

TABEL II. 1
INDIKATOR KELUARGA SEJAHTERA

No.	Indikator	Kriteria
1.	Pendapatan	Rendah (< Rp5.000.000)
		Sedang (Rp5.000.000 – Rp10.000.000)
		Tinggi (> Rp10.000.000)
2.	Konsumsi atau Pengeluaran Rumah Tangga	Rendah (< Rp1.000.000)
		Sedang (Rp1.000.000 – Rp5.000.000)
		Tinggi (> Rp5.000.000)
3.	Keadaan Tempat Tinggal	Non permanen
		Semi permanen
		Permanen
4.	Fasilitas Tempat Tinggal	Kurang
		Cukup
		Lengkap
5.	Kesehatan Anggota keluarga	Kurang
		Cukup
		Bagus
6.	Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Sulit
		Cukup
		Mudah
7.	Kemudahan Memasukkan Anak ke Jenjang Pendidikan	Sulit
		Cukup
		Mudah
8.	Kemudahan Mendapatkan Fasilitas Transportasi	Sulit
		Cukup
		Mudah

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS 2005

2.3.2 Kesempatan Kerja

Menurut Sagir (1994) dalam Susiati (2013), kesempatan kerja merupakan lapangan usaha atau kesempatan kerja yang telah tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi, dengan demikian kesempatan kerja mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan kesempatan kerja juga dapat diartikan sebagai partisipasi dalam pembangunan. Dalam hal ini untuk meningkatkan kesempatan kerja sebagai partisipasi pembangunan daerah merupakan target yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah. Upaya peningkatan kesempatan kerja dapat diwujudkan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya investasi langsung pada sektor-sektor yang bersifat padat karya, seperti konstruksi, infrastruktur, maupun industri pengolahan, sedangkan pada sektor jasa melalui perdagangan atau pariwisata (Palupi, 2014).

Pertumbuhan ekonomi dalam pengertian ekonomi makro adalah penambahan produk domestik bruto (PDB), yang berarti peningkatan pendapatan nasional, sedangkan penambahan produk domestik regional bruto (PDRB) adalah untuk tingkat provinsi (Julianery, 2002). Pertumbuhan ekonomi ada dua bentuk: *extensively* yaitu dengan penggunaan banyak sumberdaya (seperti fisik, manusia atau *natural capital*) atau *intensively* yaitu dengan penggunaan sejumlah sumberdaya yang lebih efisien (lebih produktif). Apabila pertumbuhan ekonomi dicapai dengan menggunakan banyak tenaga kerja, hal tersebut tidak meningkatkan pertumbuhan pendapatan per kapita. Namun ketika pertumbuhan ekonomi dicapai melalui penggunaan sumberdaya yang lebih produktif, termasuk tenaga kerja, maka hal tersebut akan meningkatkan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dan meningkatkan standar hidup rata-rata masyarakat.

Secara sosial, pelabuhan merupakan gambaran sebuah komunitas yang diciptakan untuk meningkatkan produktifitas melalui konsentrasi dan spesialisasi tenaga kerja, kebudayaan dan kegiatan rekreatif. Kesejahteraan penduduk berkaitan erat dengan pendapatan yang diperoleh rumah tangga. Menurut *welfare economics* dalam Nindya (2014), pendapatan rumah tangga tidak terlepas dari masalah ketenagakerjaan dalam arti pendapatan ataupun penghasilan yang diperoleh rumah tangga berkaitan dengan usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga. Dengan pendapatan tersebut, maka rumah tangga memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menyekolahkan anggota keluarganya.

Melalui pendidikan maka sumber daya manusia dapat ditingkatkan dan dapat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu, kesejahteraan penduduk sangat berkaitan erat dengan adanya kesempatan kerja.

2.4 Pengaruh Pelabuhan terhadap Aspek Ekonomi

Dalam pengembangan bidang ekonomi, pelabuhan memiliki fungsi yang dapat meningkatkan ekonomi suatu negara. Tidak hanya digunakan sebagai tempat berlabuh sebuah kapal, melainkan dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan stok barang, seperti petikemas (*container*). Menurut Bintarto (1968) dalam Franata (2015), dalam segi kepentingan suatu daerah pelabuhan memiliki arti ekonomis karena pelabuhan mempunyai fungsi sebagai tempat ekspor impor dan kegiatan ekonomi lainnya yang saling berhubungan sebab akibat. Pendapatan yang diperoleh dari ekspor akan mengakibatkan berkembangnya kegiatan penduduk setempat, perpindahan modal, dan tenaga kerja, keuntungan eksternal dan perkembangan wilayah lebih lanjut (Dampolii, 2008). Dengan adanya pelabuhan, maka terdapat keuntungan ekonomi secara langsung yang diakibatkan oleh aktivitas di pelabuhan seperti terbukanya banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar karena segala kegiatan dan bidang yang ada di pelabuhan membutuhkan tenaga kerja manusia, contohnya kuli panggul, pengatur lalu lintas pelabuhan, dan petugas kebersihan pelabuhan.

Secara prinsip hubungan kegiatan pembangunan oleh manusia di laut tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan dipantai atau bahkan pembangunan di darat. Pelabuhan menjadi sarana pertumbuhan perdagangan antar pulau dan antar negara, serta mempercepat perputaran perekonomian. Dengan adanya pelabuhan berbagai jenis usaha akan tumbuh mulai dari skala kecil hingga usaha skala internasional, harga berbagai jenis produk akan lebih terjangkau mulai dari produksi dalam negeri hingga produksi luar negeri. Pada PP No. 10 Tahun 2012 membahas mengenai peraturan-peraturan tentang perpajakan dan cukai, karena banyaknya kegiatan ekspor impor yang melalui pelabuhan maka terdapat peraturan terkait kegiatan tersebut. Tingginya kegiatan ekspor impor yang melalui pelabuhan maka akan semakin tinggi pajak yang diterima dan dapat meningkatkan

pendapatan negara. Dengan semakin banyaknya pajak yang masuk maka pemerintah dapat mengalokasikan pendapatan negara tersebut kepada masyarakat, seperti menambah subsidi bahan pangan dan subsidi pendidikan bagi masyarakat kurang mampu serta pembangunan bagi daerah-daerah yang tertinggal. Oleh karena itu pelabuhan sebagai salah satu infrastruktur yang dibutuhkan sebagai pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

2.5 Sintesis Literatur

Kajian pustaka yang telah dilakukan yang bersumber dari berbagai macam literatur dijadikan sebagai dasar peneliti dalam melakukan penelitian. Hasil dari kajian literatur yang telah dilakukan digunakan untuk menemukan variable dimana masih memiliki keterkaitan dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut ini merupakan tabel ringkasan mengenai sintesa kajian literatur dalam pembahasan pengaruh keberadaan terhadap sosial dan ekonomi:

TABEL II. 2
SINTESIS LITERATUR

No.	Sasaran	Sumber	Teori	Variabel
2.	Pengaruh Pelabuhan terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat			
		Koentjaraningrat (1981)	Kondisi sosial ekonomi adalah suatu keadaan yang diatur secara sosial dan menetapkan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat.	
		Koentjaraningrat (1981)	Penduduk dan kepadatan penduduk, konsumsi dan produksi pangan, perumahan, sandang, kesehatan dan penyakit, sumber-sumber kekuatan dan pada tingkat dasarnya faktor-faktor ini berkembang tidak menentu dan sangat drastis mempengaruhi kondisi dimana manusia itu harus hidup	
		Purmadiansyah (2018)	Kesejahteraan sosial dalam artian luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.	

No.	Sasaran	Sumber	Teori	Variabel
		Adi (2003) dalam Purmadiansyah (2018)	Taraf kehidupan yang lebih baik tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental, dan segi kehidupan spiritual	
		UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.	
2.1	Kesejahteraan Sosial	Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS 2005	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan • Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga • Keadaan tempat tinggal • Fasilitas tempat tinggal • Kesehatan anggota keluarga • Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan • Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan • Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan dan pengeluaran rumah tangga • Keadaan dan fasilitas tempat tinggal • Kemudahan mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan • Kemudahan mendapatkan fasilitas dan pelayanan pendidikan
2.2	Kesempatan Kerja	Sagir (1994)	Kesempatan kerja merupakan lapangan usaha atau kesempatan kerja yg telah tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi, dengan demikian kesempatan kerja mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan kesempatan kerja juga dapat diartikan sebagai partisipasi dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kesempatan Kerja
		Palupi (2014)	Upaya peningkatan kesempatan kerja dapat diwujudkan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya investasi langsung pada sektor-sektor yang bersifat padat karya, seperti konstruksi, infrastruktur, maupun industri pengolahan, sedangkan pada sektor jasa melalui perdagangan atau pariwisata	

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Dari sintesis literatur yang telah diuraikan diatas, maka disusunlah sasaran dan indikator Penelitian sebagai arahan terkait data penelitian di lapangan. Adapun sasaran dan Indikator Penelitian terlihat pada tabel berikut :

TABEL II. 3
SASARAN DAN VARIABEL/PENYESUAIAN PENELITIAN PENELITIAN

No.	Sasaran	Variabel/ Penyesuaian Penelitian	Keterangan
1.	Pengaruh Pelabuhan terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat		
	Kesejahteraan Sosial	Pendapatan	Pendapatan merupakan penghasilan yang diterima dan dihitung dalam jangka waktu tertentu. Tingkat pendapat yang tinggi dapat memberikan peluang dalam meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidup.
		Konsumsi atau Pengeluaran Rumah Tangga	Dengan menggunakan data pengeluaran rumah tangga maka dapat diketahui pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan tolak ukur guna menilai tingkat kesejahteraan ekonomu penduduk. Makin rendah presentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka makin membaik pula tingkat kesejahteraan penduduknya.
		Keadaan Tempat Tinggal	Kriteria tempat tinggal yang dinilai adalah jenis atap rumah, dinding rumah, status kepemilikan rumah, lantai rumah, dan luas lantai rumah.
		Fasilitas Tempat Tinggal	Adapun fasilitas tempat tinggal yang dinilai, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, WC serta jarak WC dari rumah.
		Kemudahan Mendapatkan fasilitas dan Pelayanan Kesehatan	Kemudahan pelayanan kesehatan, yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, dan alat kontrasepsi.
		Kemudahan Mendapatkan Fasilitas dan Pelayanan Pendidikan	Kriteria kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan.
	Kesempatan Kerja	Kesempatan Kerja	Kesempatan kerja merupakan lapangan usaha atau kesempatan kerja yg telah tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi, dengan demikian kesempatan kerja mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan kesempatan kerja juga dapat diartikan sebagai partisipasi dalam pembangunan

Sumber: Hasil Analisis, 2019